

**MANFAAT SISTEM PENGELOLAAN DATA TERHADAP
PENATAAN ASSET DAERAH DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASSET DAERAH KABUPATEN DOGIYAI**

Lenny Boma

(Email : lennytebayboma@gmail.com)

Christina Martha Lewerissa

(Email : lewerissac@gmail.com)

Damaris Pasalli

(Email : damarispasalli74@gmail.com)

Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Satya Wiyata Mandala

ABSTRAK

Agar dapat menerapkan prinsip Good Governance maka pemerintah daerah harus mampu mengelola asset daerah yang dimilikinya daerah, asset daerah merupakan barang milik Negara / daerah yang penggunaan dan pemanfaatannya dipercayakan oleh daerah untuk dikelola secara baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui sejauhmana manfaat sistem pengelolaan data terhadap Penataan asset daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Dogiyai, 2). Untuk mengetahui kendala – kendala apa yang diperoleh dari manfaat sistem pengelolaan data terhadap Penataan asset daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Dogiyai dan 3). Untuk mengetahui manfaat apa yang diperoleh dari sistem pengelolaan data terhadap Penataan asset daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Dogiyai

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel yaitu *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 43 responden, melalui teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan pembagian kuesioner

Keyword : Pengelolaan Data dan Penataan Asset Daerah

PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa ayat 1). Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dan ayat 2). Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Kemampuan daerah dalam mengelola dan menata asset daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang mana asset daerah merupakan kekayaan yang dimiliki daerah untuk dijaga, ditata dan dipergunakan sesuai pemanfaatannya

Pemerintah daerah terkadang menemukan kendala dalam asset daerah yang dimiliki menurut Sumini dan Oktavia Ester Pangaribuan (2010 : 13) Faktor lainnya adalah terbatasnya tenaga SDM yang menyajikan laporan keuangan, kebijakan untuk pengelolaan aset yang belum mengakomodir semua hal yang diperlukan, penguasaan dan pemeliharaan aset agar tidak hilang, rusak, atau dicuri, dan sebagainya.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Dogiyai melalui Badan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Dogiyai melakukan upaya untuk mendata dan menginput asset daerah Kabupaten Dogiyai

Dikarenakan betapa pentingnya pengelolaan asset daerah terutama menyangkut sistem keuangan yang menjadi kebutuhan bagi pemerintah daerah maka diperlukan sistem pendataan komputerisasi agar setiap kebutuhan ataupun proses penggunaan keuangan yang merupakan asset bagi daerah dapat di kontrol dan dioptimalisasi sesuai dengan prosedur yang dimiliki daerah.

Untuk itu diperlukan kemampuan Sumber Daya Manusia yang handal dan memahami tentang sistem pengelolaan data dikarenakan dalam pengelolaan data yang berbasis aplikasi atau program keuangan maka dibutuhkan tenaga kerja yang memahami komputer dan memiliki kehati – hatian serta teliti dalam menginput data dari perencanaan hingga pelaksanaan dalam penggunaan dana untuk keperluan dalam kegiatan perangkat daerah agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dogiyai tentunya Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah harus mampu mengelola asset daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan penggunaan dari asset daerah yang dimiliki

Adapun perumusan masalah yang hendak dikaji yaitu :

1. Sejauhmana manfaat sistem pengelolaan data terhadap Penataan asset daerah di Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Dogiyai ?

2. Kendala – kendala apa yang diperoleh dari manfaat sistem Penataan data terhadap penataan asset daerah di Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Dogiyai ?
3. Manfaat apa yang diperoleh dari sistem pengelolaan data terhadap Penataan asset daerah di Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Dogiyai ?

LANDASAN TEORI

A. Sistem Pengelolaan Data

Menurut Mc. Leod (2001 : 11) sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Darmawan (2013 : 6), sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, yaitu :

- a. Sistem *abstrak*, adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide.
- b. Sistem *fisik*, adalah sistem yang ada secara fisik.
- c. Sistem *tertentu*, adalah sistem dengan operasi tingkah laku yang dapat diprediksi,
- d. Sistem *tak tentu*, adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi.
- e. Sistem *tertutup*, adalah sistem yang tidak dapat bertukar materi, informasi, atau energi dengan lingkungan.
- f. Sistem *terbuka*, sistem yang berhubungan dengan lingkungan.

Menurut Bodmar (2010). “*Electronic Data Processing (EDP)* adalah pemanfaatan teknologi komputer untuk pengolahan data yang berorientansi pada transaksi dalam suatu organisasi. EDP adalah aplikasi sistem informasi yang *paling mendasar dalam setiap organisasi*”.

Menurut Mc. Leod (2008) teknologi informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya.

Menurut Darmawan (2013: 13-14), komponen komponen sistem informasi dibagi sebagai berikut :

- a. Perangkat keras (*Hardware*)
- b. Perangkat lunak (*Software*)
- c. Manusia (*Brainware*)
- d. Prosedur (*Procedure*)
- e. Basis data (*Database*)
- f. Jaringan komunikasi (*Communication network*)

B. Penataan Asset Daerah

Menurut Hidayat (2012 : 4) berpendapat bahwa: “Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, terdiri dari benda tidak berwujud maupun yang berwujud, yang tercakup dalam aktiva/aset atau harta aset dari suatu instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu perorangan”.

Menurut Siregar (2004 : 178), pengertian asset secara umum adalah: “Barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan)”

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010 : 174) berpendapat bahwa aset atau BMD adalah: “Semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya

Menurut Cris Kuntadi dalam Majalah Ikatan Indonesia (2008) menyatakan bahwa Pemda juga harus serius mengelola aset dengan mempelajari manajemen aset. Apalagi, manajemen aset terkait dengan bagaimana cara mengelola aktiva tetap, agar aktiva tetap

Menurut M. Yusuf (2010 : 8) yakni pengelolaan aset daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik.

Menurut Siregar (2004 : 518), pengelolaan aset telah berkembang cukup pesat, namun di Indonesia hal ini khususnya dalam konteks pengelolaan aset pemerintah daerah sepenuhnya belum dipahami oleh para pengelola barang milik daerah

Menurut Mardiasmo (2004 : 241) menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan, maka jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif yaitu penelitian yang berusaha memutarakan data menganalisa dan menginterpretasi

B. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Badan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Dogiyai

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dogiyai yaitu sebanyak 71 orang

2. Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana menurut Sugiono (1998 : 62) adalah teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja yaitu yang memahami tentang keadaan pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dogiyai. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah populasi yaitu sebanyak 43 orang yang terdiri dari :

1. Sub Bagian Keuangan	: 5 orang
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	: 5 orang
3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	: 5 orang
4. Bidang Anggaran Dan Otoritas	: 7 orang
5. Bidang Penetapan Dan Akuntansi	: 7 orang
6. Bidang Perbendaharaan	: 7 orang
7. <u>Bidang Aset Daerah</u>	<u>: 7 orang</u>
Jumlah	: 43 orang

D. Teknik Pengolahan Data

Menurut Mallo (1986 : 61) langkah – langkah pengolahan data adalah Editing, Koding dan Tabulasi data.

1. Mengedit yaitu melihat kegunaan atau kejelasan tidaknya data yang dikumpulkan, tahap ini dimaksudkan untuk memastikan suatu data apakah data tersebut dapat dipakai atau tidak.
2. Mengkode adalah tahap klasifikasi yang dapat penulis tempatkan pada kategori jawaban menurut macamnya.
3. Mentabulasi yaitu setelah data berada pada kategori yang sudah disiapkan, maka penulis mengadakan tabulasi untuk menentukan kategori jawaban responden. Frekwensi Data Yang diperoleh melalui perhitungan persentase dengan rumus Anton Dayan (1973 : 45) sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Persentase (%)

f : Distribusi frekuensi dari jawaban tiap responden

n : Jumlah responden

100 : Nilai Konstan

E. Teknik Analisis Data

Untuk mengalisa data dan informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kuantitatif / deskriptif yaitu semua data yang berbentuk angka – angka selanjutnya di interprestasikan ke dalam bentuk uraian yang tekstruktural (uraian kalimat atau kata – kata).

PEMBAHASAN

A. Sistem Pengolahan Data

1. Petugas Input

Tabel 1

Distribusi Jawaban responden tentang setiap bidang memiliki petugas penginputan yang memahami komputerisasi

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Paham	17	39,53
2	Kurang Paham	17	39,53
3	Tidak Paham	9	20,94
Jumlah		43	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2019

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 1 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang setiap bidang memiliki petugas penginputan yang memahami komputerisasi menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban Paham dan Kurang Paham dengan jumlah responden sebanyak 17 orang (39,53%) hal ini membuktikan bahwa pada masing – masing bidang yang terdapat di Kantor tentunya memiliki komputer yang mampu mengerjakan tugas pokok sesuai bidangnya akan tetapi tentunya pegawai yang masing – masing bidang tidak seluruhnya mampu melakukan penginputan secara dasar terhadap sistem operasi komputer terutama ketika sistem penginputan mengalami perubahan tentunya pemegang komputer harus mempelajari untuk dapat menjalankan program dan mengoperasikan komputer dengan aplikasi yang baru

Tabel 2

Distribusi Jawaban responden tentang petugas input melakukan tugasnya sesuai dengan data yang diperoleh

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	14	32,56
2	Kadang – kadang	20	46,51
3	Tidak Pernah	9	20,93
Jumlah		43	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2019

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 2 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang petugas input melakukan tugasnya sesuai dengan data yang diperoleh menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban Kadang – kadang dengan jumlah responden sebanyak 20 orang (46,51%) hal ini membuktikan bahwa pegawai yang bekerja di Kantor terutama yang ditugaskan untuk mengoperasikan komputer tentunya melakukan penginputan data sesuai dengan tugas kerjanya akan tetapi ketika ada pekerjaan yang sekiranya dibutuhkan untuk menginput data lain maka petugas input terkadang membantu menyelesaikan pekerjaan yang sekiranya dapat dikerjakan

Tabel 3

Distribusi Jawaban responden tentang petugas yang menginput pernah mengalami kegagalan dalam penginputan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pernah	8	18,60
2	Kadang – kadang	25	58,14
3	Tidak Pernah	10	23,26
Jumlah		43	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2019

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 3 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang petugas yang menginput pernah mengalami kegagalan dalam penginputan menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban Kadang – kadang dengan jumlah responden sebanyak 54 orang (58,14%) hal ini membuktikan bahwa terkadang petugas input mengalami kegagalan dikarenakan data yang diinput tidak valid atau tidak sesuai dengan dibutuhkan, selain itu untuk data yang berhubungan dengan koneksi internet menjadi kendala bagi petugas input karena seringkali mengalami kegagalan dikarenakan koneksi internet yang kurang baik

2. Sistem Informasi

Tabel 4

Distribusi Jawaban responden tentang pegawai selalu memperoleh sistem informasi yang ter-update

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	11	25,58
2	Kadang – kadang	22	51,16
3	Tidak pernah	10	23,26
Jumlah		43	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2019

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 4 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang pegawai selalu memperoleh sistem informasi yang ter-update menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban Kadang – kadang dengan jumlah responden sebanyak 22 orang (51,16%) hal ini membuktikan bahwa dalam aktivitas sebagai pegawai tentunya terdapat pembaharuan atau data ter-update yang harus diinput oleh pegawai tetapi data yang diinput oleh pegawai disesuaikan dengan kebutuhan data yang diperlukan seperti kepengurusan kepangkatan, laporan – laporan keuangan dan juga data – data menyangkut bidang tugas kerja

Tabel 5

Distribusi Jawaban responden tentang sistem informasi yang diterapkan oleh pihak Kantor dapat diakses oleh pihak luar / OPD

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Dapat	9	20,93
2	Kadang – kadang	14	32,56
3	Tidak pernah	20	46,51
Jumlah		43	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2019

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 5 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang sistem informasi yang diterapkan oleh pihak Kantor dapat diakses oleh pihak luar / OPD menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban Tidak pernah dengan jumlah responden sebanyak 20 orang (46,51%) hal ini membuktikan bahwa sistem akses data yang dimiliki oleh kantor tentunya tidak dapat diakses oleh pihak luar meskipun kantor BPKAD menginput data dari Kantor – Kantor lain sehubungan dengan keuangan tetapi untuk mengeluarkan data yang diinginkan maka penginput data harus melakukan konfirmasi kepada pihak yang akan mengambil data

Tabel 6
Distribusi Jawaban responden tentang sistem informasi yang diterapkan sesuai dengan prosedur

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sesuai	16	37,21
2	Kurang Sesuai	16	37,21
3	Tidak Sesuai	11	25,58
Jumlah		43	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2019

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 6 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang sistem informasi yang diterapkan sesuai dengan prosedur menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban Sesuai dan Kurang Sesuai dengan jumlah responden sebanyak 16 orang (37,21%) hal ini membuktikan bahwa dalam melakukan penginputan data terhadap sumber – sumber data yang dibutuhkan tentunya pegawai yang akan mengolah data dalam aplikasi membutuhkan data yang diperlukan sehingga data yang akan diinput harus sesuai dengan prosedur kerja agar data yang akan diolah tidak mengalami kesulitan ataupun kegagalan dalam mengakses data

3. Prosedur Kerja

Tabel 7
Distribusi Jawaban responden tentang pegawai memahami prosedur kerja

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Paham	17	39,53
2	Kurang Paham	17	39,53
3	Tidak Paham	9	20,94
Jumlah		43	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2019

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 7 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang pegawai memahami prosedur kerja menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban Paham dan Kurang Paham dengan jumlah responden sebanyak 17 orang (39,53%) hal ini membuktikan bahwa masih ada pegawai yang belum memahami tugas pokoknya sehingga dalam bekerja pegawai kurang mampu untuk dapat menyelesaikan beban kerjanya dikarenakan pegawai tersebut kurang memahaminya terutama yang berhubungan dengan komputer dan penginputan data

Tabel 8

Distribusi Jawaban responden tentang pegawai bekerja sesuai dengan prosedur yang dimiliki sesuai dengan tugas pokoknya

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sesuai	12	27,91
2	Kurang Sesuai	17	39,53
3	Tidak Sesuai	14	32,56
Jumlah		43	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2019

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 8 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang pegawai bekerja sesuai dengan prosedur yang dimiliki sesuai dengan tugas pokoknya menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban Kurang Sesuai dengan jumlah responden sebanyak 17 orang (39,53%) hal ini membuktikan bahwa pegawai dalam bekerja terkadang kurang mengikuti prosedur yang dimiliki dimana nampak seperti adanya tumpukan berkas yang ditaruh dimeja kerja yang mana pekerjaan tersebut sudah tuntas atau belum sehingga ketika data yang diperlukan dicari tidak dapat ditemukan

Tabel 9

Distribusi Jawaban responden tentang pegawai mampu memberikan pemahaman kepada pihak lain terhadap prosedur yang berlaku

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mampu	12	27,91
2	Kurang Mampu	19	44,18
3	Tidak Mampu	12	27,91
Jumlah		43	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2019

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 9 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang pegawai mampu memberikan pemahaman kepada pihak lain terhadap prosedur yang berlaku menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban Kurang Mampu dengan jumlah responden sebanyak 19 orang (44,18%) hal ini membuktikan bahwa tidak semua pegawai mampu melakukan penjelasan terhadap kebutuhan yang ditanyakan pihak lain dikarenakan pegawai terkadang lebih memahami beban kerja di bidangnya sehingga ketika ada pihak lain yang bertanya maka pegawai akan mengarahkan ke pegawai yang sesuai dengan bidang kerjanya

B. Penataan Asset

1. Pengadaan

Tabel 10

Distribusi Jawaban responden tentang pihak kantor selalu rutin melakukan pengadaan terhadap asset daerah

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	13	30,23
2	Kadang – kadang	18	41,86
3	Tidak Pernah	12	27,91
Jumlah		43	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2019

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 10 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang pihak kantor selalu rutin melakukan pengadaan terhadap asset daerah menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban Kadang – kadang dengan jumlah responden sebanyak 18 orang (41,86%) hal ini membuktikan bahwa kantor BPKAD sebagai penanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan asset daerah untuk masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan mengusulkan dan tentunya pihak BPKAD akan menyesuaikan permintaan berdasarkan pagu dana yang dimiliki daerah untuk dapat melihat kebutuhan apa yang dapat direalisasikan dan sangat dibutuhkan

Tabel 11

Distribusi Jawaban responden tentang pengadaan yang dilakukan dapat direalisasikan sesuai dengan kebutuhan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sesuai	11	25,58
2	Kurang Sesuai	17	39,54
3	Tidak Sesuai	15	34,88
Jumlah		43	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2019

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 11 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang pengadaan yang dilakukan dapat direalisasikan sesuai dengan kebutuhan menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban Kurang Sesuai dengan jumlah responden sebanyak 17 orang (39,54%) hal ini membuktikan bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak BPKAD sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah tentunya dalam realisasi yang dihadapi berbenturan dengan kondisi keuangan daerah sehingga terkadang yang diusulkan kurang

mampu untuk dapat merealisasikan kebutuhan terhadap asset yang dibutuhkan oleh Organisasi Perangkat Daerah

Tabel 12
Distribusi Jawaban responden tentang pengadaan yang diajukan mampu memenuhi kebutuhan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mampu	10	23,26
2	Kurang Mampu	18	41,86
3	Tidak Mampu	15	34,88
Jumlah		43	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2019

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 12 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang pengadaan yang diajukan mampu memenuhi kebutuhan menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban Kurang Mampu dengan jumlah responden sebanyak 18 orang (41,86%) hal ini membuktikan bahwa keterbatasan anggaran yang dimiliki membuat setiap usulan untuk pengadaan asset yang dibutuhkan terkadang kurang mampu dipenuhi sehingga untuk pengadaan tersebut akan diusulkan pada tahun anggaran berikutnya

2. Pemeliharaan

Tabel 13
Distribusi Jawaban responden tentang pemerintah daerah selalu mengalokasikan dana untuk pemeliharaan asset daerah yang di miliki

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	8	18,60
2	Kadang – kadang	19	44,19
3	Tidak pernah	16	37,21
Jumlah		43	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2019

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 13 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang pemerintah daerah selalu mengalokasikan dana untuk pemeliharaan asset daerah yang di miliki menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban Kadang – kadang dengan jumlah responden sebanyak 19 orang (44,19%) hal ini membuktikan bahwa untuk asset daerah tentunya pihak BPKAD akan selalu mealokasikan dana untuk pemeliharaannya namun usulan terhadap dana pemeliharaan terhadap asset yang dimiliki daerah terkadang tidak mampu terpenuhi seluruhnya sehingga untuk sistem pemeliharaan

terkadang dana yang diperoleh akan dilakukan bertahap sehingga assetnya terpelihara dan terjaga

Tabel 14
Distribusi Jawaban responden tentang pemeliharaan asset daerah rutin selalu dilakukan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Rutin	13	30,23
2	Kadang – kadang	17	39,54
3	Tidak Rutin	13	30,23
Jumlah		43	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2019

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 14 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang pemeliharaan asset daerah rutin selalu dilakukan menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban Kadang – kadang dengan jumlah responden sebanyak 17 orang (39,54%) hal ini membuktikan bahwa untuk merawat dan menjaga asset yang dimiliki daerah tentunya pihak BPKAD akan berupaya untuk dapat dimasukkan dalam anggaran pemeliharaan akan tetapi terkadang sistem pemeliharaan tidak lanjut sehingga akan dilanjutkan secara bertahap tergantung dengan kejelasan sumber dana yang diberikan

Tabel 15
Distribusi Jawaban responden tentang dana yang dialokasi cukup untuk melakukan perawatan dalam pemeliharaan asset daerah

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Cukup	14	32,56
2	Kadang – kadang	17	39,53
3	Tidak Cukup	12	27,91
Jumlah		43	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2019

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 15 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang dana yang dialokasi cukup untuk melakukan perawatan dalam pemeliharaan asset daerah menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban Kadang – kadang dengan jumlah responden sebanyak 17 orang (39,53%) hal ini membuktikan bahwa keterbatasan dana yang diperoleh atau dana yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah serta Organisasi Perangkat Daerah yang mengajukan anggaran tentunya akan disepakati besaran dana sesuai dengan sumber dana yang dimiliki daerah sehingga terkadang pemeliharaan mengalami

kendala karena keterbatasan sumber dana yang diperoleh sehingga aktivitas dapat berjalan

3. Penggunaan

Tabel 16
Distribusi Jawaban responden tentang penggunaan asset daerah selalu
diperuntukkan untuk Aparatur Sipil Negara

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	12	27,91
2	Kadang – kadang	19	44,18
3	Tidak pernah	12	27,91
Jumlah		43	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2019

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 16 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang penggunaan asset daerah selalu diperuntukkan untuk Aparatur Sipil Negara menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban Kadang – kadang dengan jumlah responden sebanyak 19 orang (44,18%) hal ini membuktikan bahwa dalam penggunaan asset daerah tentunya diperuntukkan seluruh masyarakat Kabupaten Dogiyai terutama asset daerah yang bersifat publik namun untuk yang sifatnya asset daerah yang terdapat di urusan bidang pada urusan masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka menjadi asset bagi Instansi terhadap as Ahmadfarad (2019) set daerah yang dimiliki seperti tanah dan bangunan

Tabel 17
Distribusi Jawaban responden tentang dana yang dipergunakan untuk pengelolaan
dan penataan asset daerah mampu dalam penggunaannya

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mampu	8	18,60
2	Kurang Mampu	19	44,19
3	Tidak Mampu	16	37,21
Jumlah		43	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2019

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 17 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang dana yang dipergunakan untuk pengelolaan dan penataan asset daerah mampu dalam penggunaannya menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban Kurang Mampu dengan jumlah responden sebanyak 19 orang (44,19%) hal ini membuktikan bahwa kebutuhan akan anggaran

yang dibutuhkan untuk biaya perawatan akan asset daerah masih belum mampu atau cukup untuk dipergunakan sehingga terkadang pihak BPKAD sebagai pengelola dana dan asset daerah akan melakukan bertahap dalam penggunaan anggaran yang dipergunakan untuk asset daerah

Tabel 18
Distribusi Jawaban responden tentang penggunaan asset daerah selalu mendapat persetujuan dari Badan Keuangan Dan Asset Daerah

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	23	53,49
2	Kadang – kadang	11	25,58
3	Tidak Pernah	9	20,93
Jumlah		43	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2019

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 18 mengenai Distribusi Jawaban responden tentang penggunaan asset daerah selalu mendapat persetujuan dari Badan Keuangan Dan Asset Daerah menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban Selalu dengan jumlah responden sebanyak 23 orang (53,49%) hal ini membuktikan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam mengajukan anggaran yang berkaitan dengan biaya dari Asset Daerah yang dimiliki tentunya harus mendapatkan persetujuan dari pihak BPKAD selalu Organisasi Perangkat Daerah yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dan mengurus keuangan serta asset yang dimiliki daerah

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan data memiliki manfaat terhadap penataan asset sehingga petugas input harus memahami teknologi dan juga informasi terutama dalam penginputan data baik keuangan maupun asset daerah
2. Kendala – kendala yang diperoleh dari sistem pengelolaan data dan penataan asset daerah yaitu :
 - a. Kegagalan dalam sistem penginputan yang dilakukan oleh petugas input ketika menginput data
 - b. Sistem informasi yang lambat diperoleh sehingga terkadang menimbulkan informasi yang tidak ter-update sehingga data yang input tidak dapat diproses
 - c. Kemampuan pegawai terhadap pemahaman kerja hanya fokus terhadap bidang tugasnya

- d. Dalam penataan asset daerah, dimana untuk pengadaan, pemeliharaan dan penggunaannya harus mendapatkan persetujuan dari Pihak BPKAD terutama dalam penggunaan anggaran
3. Manfaat yang diperoleh dari sistem pengelolaan data terhadap asset daerah, yaitu data data terinput dengan baik secara teknologi baik data keuangan maupun data asset daerah yang dimiliki Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat di Kabupaten Dogiyai

B. Saran

1. Setiap Organisasi Perangkat Daerah harus membuat data tentang asset daerah yang dimiliki sehingga data dapat terkontrol dan dapat terdata
2. Kepala BPKAD perlu membuat akses penginputan secara online sehingga Organisasi Perangkat Daerah dapat melaporkan secara langsung melalui jaringan
3. Perlu menambah tugas penginputan data sehingga laporan keuangan dari Organisasi Perangkat Daerah mampu terinput tepat waktu
4. Perlu mensosialisasikan perangkat baru kepada Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan dengan keuangan dan asset daerah yang dimiliki

DAFTAR PUSTAKA

- Bodnar, George H. dan William S. *Hopwood, Accounting Information Systems*, Edisi 10, USA : Pearson Education, 2010
- Cris Kuntadi dalam Majalah Ikatan Indonesia (2008
- Dajan, Anto, *Pengantar Metode Statistik*, LP3ES, Jakarta, 1973
- Darmawan, Deni, *Sistem Informasi Manajemen*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2013
- Hidayat, Muchtar, *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2012
- M. Yusuf, *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Terbaik*, Penerbit Salemba Empat, 2010
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik. Cetakan ke-4*, Yogyakarta, Andi, 2002
- Mc. Leod Pearson, *Sistem Informasi Manajemen*, Salemba, Jakarta, 2008
- Mallo (1986
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Siregar, Doli D, *Manajemen Aset*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Soleh, C, dan Rochmansjah, H, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Fokusmedia, Bandung, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Sumini dan Oktavia Ester Pangaribuan, *Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan BMD Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan*, 2010

